

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ghofur, Abdul, *Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 210–215.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), 512–515.
- Ismaya, Anas, *Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 145–149.
- Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 203.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 156.
- Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, “Metodologi Riset Hukum”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 89.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 237.
- Ramadhani, Ratmat, S.H.,M.H., *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 105.
- Saleh, Wantjik, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia, Jakarta, 30.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2017), 189–193.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), 345.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2001), 234–238.
- Sapto Nugroho Sigit, Tohari Muhammad Tohari, Raharjo Mudji, *HUKUM AGRARIA INDONESIA*, (Solo: Pustaka Iltizam, Tahun 2017)
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, “Metodologi Riset Hukum”, (Oase Pustaka, Tahun 2020)
- Gusti Nyoman Guntur I, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas”, (STPN Press: Yogyakarta, Tahun 2017)

### JURNAL

- Abas, Muhamad, Affian Fandi Putra, Aldora Ananda Putra Himim, Intan Elga, Muhammad Iqbal Fauzi, and Sagita Dwi Permata. “Juridical Analysis of Land Ownership Discrepancies in Certificates and SPPT Legality in Lemahmakmur Village Based on Regulation 24 / 1997” 1, no. 5 (2024): 1–8.
- Adi, Anselma Palma Putri Kencana. “Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli

- Waris.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): 165–84. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184>.
- Ali, M. K., and Rahman, T. “Legal Challenges of Land Tenure in Developing Countries: A Case Study of Identity Errors.” *Journal of Land Use Science* 15, no. 3 (2020): 311–328. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2020.1775128>.
- Alam, Aldani, Joko Sriwidodo, and Anriz Nazaruddin Halim. “Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pejabat PPAT Secara Online Penggunaan Aplikasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* (2023). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1507>.
- Amini, Sulasiyah. “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1326–40.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Andrianto, Wahyu. “Catatan Sederhana Untuk Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Oleh Wahyu Andrianto, S.H., M.H.” *Fakultas Hukum Univeristas Indonesia* (2023).
- Augustinus, C., and Barry, M. “Improving Land Governance through Legal Harmonization of Personal Data.” *Land Use Policy* 101 (2021): 105145. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105145>.
- Cahyaningtyas, P. S. “Aspek Hukum Akta Notaris Terkait Perubahan Nama dalam Sertifikat Tanah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 4 (2022): 102–116. <https://doi.org/10.35586/jish.v5i4.5993>.
- Engeline R. Palandeng, and Jemmy Sondakh. “Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021): 98–108.
- Gyamfi, I. K., and Baffoe, G. “Modernizing Land Administration Systems to Address Data Discrepancies.” *Land* 12, no. 1 (2023): 108. <https://doi.org/10.3390/land12010108>.
- Handayani, I. G. A. K. R. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Mengalami Perbedaan Identitas.” *Jurnal Ilmu Hukum Ampere* 6, no. 2 (2022): 210–225. <https://doi.org/10.22225/juinhum.v6i2.8765>.
- Indriyani, D., and Nurhayati, R. “Analisis Terhadap Mekanisme Perbaikan Sertifikat Tanah yang Mengalami Kesalahan Identitas.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 742–760. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2341>.
- Irwanda,” Sengketa Hak Atas Tanah Yang Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol.5, No.3, Tahun 2023, 440.
- Marx, C., and Rubin, M. “Property Rights and Informality in Land Administration.” *Land Use Policy* 104 (2021): 105391. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105391>.
- Nuridin, H. “Politik Hukum Pertanahan.” *Meraja Journal* (2018).
- Palenewen, James Yoseph,” Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura”, *Socius: Jurnal*

- Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1, No.5, Desember 2023, 554.
- Prameswari, Angela Pramudya Dyani. “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* (2014).
- Pramudito, A. Y. “Peran Disdukcapil dan BPN dalam Menyelesaikan Perbedaan Nama Pemilik Tanah.” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 3 (2021): 230–247. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.3.230-247>.
- Putri, N. L. A. R., and Santosa, M. A. “Implementasi Program PTSL Terhadap Percepatan Pendaftaran Tanah dan Penyesuaian Identitas.” *Jurnal Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 10, no. 1 (2024): 33–47. <https://doi.org/10.31292/jbhumi.v10i1.9021>.
- Rachmawati, F., and Widodo, S. H. “Implikasi Hukum Perbedaan Nama Dalam Sertifikat Hak Milik Terhadap Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 45–59. <https://doi.org/10.31289/positum.v8i1.12345>.
- Rahman, A., and Maharani, F. “Tinjauan Yuridis Koreksi Nama di Sertifikat Hak Milik.” *Jurnal Reformasi Hukum* 11, no. 1 (2023): 70–84. <https://doi.org/10.24269/reformasi.v11i1.7890>.
- Sahnan, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. VII, No.3, Desember 2019, 438.
- Saifudin, Sendy Salsabila, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama”, *Notary Law Journal*, Vol.1, No. 1, January 2022, 41.
- Saputra, D. R., and Lestari, D. A. “Sinkronisasi Data Identitas pada Dokumen Pertanahan dan Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 7, no. 2 (2022): 155–170. <https://doi.org/10.33087/jhk.v7i2.4521>.
- Suparjo, A., and Suryadi, T. “Ketidakcocokan Data Pemilik Tanah Dalam Sertifikat Hak Milik: Telaah Yuridis.” *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021): 111–130. <https://doi.org/10.33366/rv.v10i3.6758>.
- Syahputra, Edi, and Alvindi Alvindi. “Berlakunya Perubahan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).” *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (2022). <https://doi.org/10.33487/mgr.v3i1.3923>.
- Usman, Abdul Hamid. “Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* (2020). <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>.
- Warsito, Lilik. “Ownership And Control Of Land Rights In The Legal System Of Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 217–26.
- Wijayanti, A. “Kesesuaian Data Kependudukan dan Sertifikat Tanah dalam Sistem Administrasi Pertanahan Modern.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.54617/jli.v21i1.10123>.
- Zevenbergen, J. A. “Land Registration and the Problem of Name Inconsistency.” *Journal of Property Law* 15, no. 2 (2022): 98–113. <https://doi.org/10.1080/09599916.2022.1920543>.
- Zulhadji, Ardiansyah. “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.” *Lex Crimen* (2016).
- Rahmat Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol.2, No.1 Tahun 2021
- Fandri Entiman Nae,”Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat ”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 5, Tahun 2023
- Muhammad Ulil Absor, Muhammad Zaki Mubarak,” Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial”, *Jurnal Multidisplin*, Vol. 01, No. 05, Tahun 2023
- Tiena Masriani Yulies,”Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak”, *Jurnal USM Law Review*, Vil. 5, No.2, tahun 2022.
- Aliyah Melatul, “Pelaksanaan Pendaftaran Perlalihan Hak Atas Tanah Bekas Adat Yang Belum Bersertifikat (Studi Di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon)”, *Indonesian law Reform Journal*, Vo;l. 1, No. 2, Juli 2021.
- Purnama Dwi,” *The Role of The National Land Agency in Preventing and Setting Land Disputes in Indonesia*”, *Journal Of Law, Politic and Humanities*, Vol.4, No.4, mei 2024.
- Samuel Palantung Rocky,” Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, *Journal Lex Privatum*, Vol. IX, No.6, Mei 2021.
- Gusti Nyoman Guntur I,”*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:Proses dan Evaluasi Program Prioritas*”, (STPN Press:Yogyakarta, Tahun 2017).
- Rahmalia Yulianto Anisa,”Peran Kantor Pertanahan Dalam Pengawasan Pembuatan Akta Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Banyumas”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultah Agung Semanrang 2024.
- Irwanda,” Sengketa Hak Atas Tanah Yang Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol.5, No.3, Tahun 2023.
- Heryanti,”Perlindungan Hukum Terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No.2, Agustus 2024.
- Made Silvia Gayatri Ni “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.1, Tahun 2021.
- Trinengsi Taolin,”Fitriai Kesadaran Masyarakat Dalam Pendaftaran Perlihan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.7, No.1, Tahun 2024.
- Amini Sulasiyah,” Pentingnya Pendaftaran tanah: Persepektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5, No. 3, Agustus 2022.
- mayanti famaldiana, Liza”Implikasi Hukum Keterlambatam Pendaftaran Akta Perlaihan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima)”, *Jurnal Ius*, Vol. IV, No.3, Desember 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan Akta Tanah

## Skripsi

Zulfikar, "Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

## Web Page

Marsono, "Prosedur dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN Terbaru", *Diakses*, Juli 25 2025

, <https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2126-Prosedur-dan-Biaya-Balik-Nama-Sertifikat-Tanah-di-BPN-Terbaru>

"Mengurus Sertifikat Tanah", Portal Informasi Indonesia, *diakses* 28 Juli 2025 17:48 Wib, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/mengurus-sertifikat-tanah>

Sertifikat Tanah Warisan Berubah Nama, Warga Bantul Laporkan Polisi," *Kompas TV*, *Diakses* pada 30 April 2025, <https://www.kompas.tv/regional/591282/sertifikat-tanah-warisan-berubah-nama-warga-bantul-lapor-polisi>.

Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah oleh Keluarga Sendiri di Bajawa Berujung Hingga MA," *Indonesia Satu*, 22 Mei 2025, *Diakses* pada 25 Juli 2025, <https://indonesiasatu.co/detail/-1747628815>

Sertifikat Tanah Mbah Tupon Beralih Nama, ATR/BPN Bantul Duga Ada Cacat Administrasi," *Republika*, 8 Mei 2025, <https://rejogja.republika.co.id/berita/svixs0291/sertifikat-tanah-mbah-tupon-beralih-nama-atrbpn-bantulduga-ada-cacat-administrasi>